

SIKAP KITA

9 Juta, Prank

SUDAH gembira, kabarnya sangat baik, muncul diakhir tahun, tentang gaji. Sebulan minimal Rp 9 Juta, bisa mencapai Rp 10 juta. Itu untuk pegawai negeri sipil, mulai berlaku, tahun ini 2020. Tapi prank. Rupanya penyampaian Menpan RB Tjaho Kumolo itu, tak sinkron dengan kementerian keuangan. Sebab penetapan kebijakan gaji maupun tunjangan bagi PNS sendiri juga masuk dalam kewenangan Kementerian Keuangan selaku benda hara negara. Oleh sebab itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana menaikkan tunjangan/gaji PNS.

"Belum ada rencana untuk menaikkan gaji PNS," kata wanita yang akrab disapa Puspa tersebut ketika dihubungi detikcom, Sabtu (2/1). Puspa mengatakan, pemerintah sudah menetapkan besaran APBN untuk tahun anggaran 2021. Dalam postur APBN 2021, tak ada kenaikan tunjangan atau gaji PNS. Pasalnya, pemerintah masih fokus kepada penanganan pandemi virus Corona (COVID-19), dan juga pemulihannya ekonomi.

"APBN tahun 2021 dan kebijakan fiskalnya sudah diundangkan dalam Undang-undang (UU) nomor 9 tahun 2020. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada penanganan pandemi dan pemulihannya ekonomi," terang Puspa.

Meski begitu, menurutnya pemerintah sedang mengkaji wacana kenaikan gaji maupun pensiunan PNS. Kajian gaji PNS itu termasuk bagaimana dampaknya pada keuangan negara.

"Terkait mengenai pelaksanaan UU 5 tahun 2014 tentang ASN yang diantaranya mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun, saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep, dengan mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang," ujar Puspa. Sebelumnya, Tjaho mengatakan rencana kenaikan tukin PNS minimal Rp 9-10 juta seharusnya dilakukan pada tahun 2020. Namun, kebijakan tersebut tak diterapkan karena pandemi COVID-19. (*)

Era New Normal, Pemerintah Konsisten dan Masyarakat Disiplin

BADAN Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 adalah transmisi dari manusia ke manusia melalui droplets. Droplet ini bisa terhirup oleh orang lain yang dekat dengan orang pembawa virus, atau menempel ke permukaan benda jika orang lain menyentuhnya dan kemudian mengusap hidung, mulut, atau mata. Di Era New Normal saat ini, bagi sebagian orang mungkin sudah menganggap remeh virus ini.

Tapi apakah ada yang menyadari jika seseorang yang mempunyai comorbid atau penyakit bawaan seperti penyakit asma, penyakit diabetes, gagal ginjal kronis, hipertensi, orang yang sedang menjalani pengobatan seperti kemoterapi, akan menjadisanggat berbahaya? Masyarakat harus segera menyadari dan menerapkan protokol Kesehatan sebagai suatu lifestyle.

Karena untuk melindungi diri sendiri, keluarga dirumah dan orang sekitar yang kita sayangi. Berdasarkan bahaya virus dengan cara penularannya Gubernur provinsi Gorontalo mengeluarkan peraturan gubernur dan upaya ini menjadi sangat penting, sebagai tanggungjawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tertular Virus Penyakit Covid-19.

Pada tanggal 17 agustus 2020 Gubernur provinsi Gorontalo telah menetapkan peraturan gubernur Gorontalo no 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum.

Tujuan agar masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol Kesehatan sehingga dapat menekan penyebaran virus covid-19 dengan harapan angka kasus pasien terkonfirmasi covid-19 di provinsi Gorontalo menurun. Pada kenyataannya, semenjak peraturan ini ditetapkan sampai pada pertengahan desember 2020 tidak terjadi penurunan kasus. Data yang ditemukan di website <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19/> pada tanggal 17/08/2020 kasus terkonfirmasi positif covid-19 berjumlah 1788 orang, pada tanggal 16/12/20 berjumlah 3342 orang.

Kurang lebih 3 bulan penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 berjumlah 1.554 orang. Belum lagi terjadi pelonjakan kasus di akhir tahun 2020 yang belum tercatat oleh sistem. Apakah ada yang salah dengan peraturan yang telah dibuat? Pergub no 41 tahun 2020 telah di laksanakan di seluruh kabupaten di provinsi Gorontalo. Namun, kebijakan ini belum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol Kesehatan. Puslitbang Humaniora dan

Oleh:
Hellen Sindim

Manajemen Kesehatan, Badan Litbangkes, telah melakukansurvei secara on-line (internet, facebook, instagram, twitter, whatsapp) terkait Kepatuhan Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Higienis Perorangan, terkumpul 19.654 responden (70% perempuan, 30% laki-laki; 94% berumur antara 17-55 tahun) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil yang di dapatkan Tingginya level pengetahuan masyarakat tentang cara penularan dan penyebaran Virus Covid-19 tidak dibarengi dengan praktik yang disiplin oleh warga masyarakat. Dengan berbagai alasan, sebagian warga masyarakat menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing/social distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang lain. Dengan berbagai alasan, sebagian

warga masyarakat masih keluar rumah dengan tidak menggunakan APD yang adekuat (masker, sarungtangan), dan sewaktu pulang kerumah masih ada yang tidak melalukan cuci tangan atau mandi.

Berdasarkan hasil survei tersebut bisa dilihat, diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini agar masyarakat dapat disiplin untuk menerapkan protokol Kesehatan.

Sebagian ahli Kesehatan masyarakat FKM UI Pak Hasibullah Thabran dalam metro TV mengatakan, kalau pemerintah kuat dan rakyat disiplin maka kasus akan turun, rakyat tidak disiplin tapi pemerintah kuat kasus masih bisa turun karena pemerintah bisa menekannya, tapi jika pemerintah lemah walaupun rakyat disiplin kasus bisa terus bertambah. Diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan agar dapat masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan.

Berdasarkan data yang telah ditemukan, maka dapat diidentifikasi rekomendasi kebijakan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terlaksana dengan maksimal sehingga angka kasus di tahun 2021 dapat menurun. Era New normal, Pemerintah konsisten dan masyarakat disiplin.

Perlu untuk secara terus menerus melakukan edukasi melalui berbagai

saluran yang ada (media sosial, media elektronik, lebaran, komunikasi, dan sebagainya) terkait dengan protokol Kesehatan agar masyarakat tidak lupa akan virus covid-19 yang masih terus ada diskirat masyarakat.

Perlu ketegasan dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan agar masyarakat dapat tertib menerapkan protokol kesehatan.

Perlu mengevaluasi pelaksanaan terkait kebijakan di setiap pemerintah kabupaten karenatapaada monitoring khusus kebijakan tidak dapat diterapkan dengan maksimal.

Membuat dalam peaturan daerah sehingga seluruh institusi dalam pemerintahan dapat bertanggung jawab. Dalam peraturan daerah perlu mencantumkan mekanisme dalam monitoring dan evaluasi secara tegas dan jelas agar kepala daerah bisa mengambil kebijakan untuk diterapkan dalam daerah masing-masing. Perlu mempertegas pada sosialisasi dan partisipasi agar dinas terkait dapat menjalankan tugas dengan maksimal. (*)

Penulis adalah Mahasiswa Magister Keperawatan, Kepimpinan dan manajemen Keperawatan, Universitas Indonesia. Email : hellensindim@gmail.com

SAMBUNGAN ETALASE

Listrik Apung

dari halaman 1

paling kuat. PJB sudah sering bikin sejarah. PJB lah yang pertama memiliki unit PLTU 1.000 MW di Indonesia. Artinya, satu pembangkit saja bisa menghasilkan 1.000 MW. Di Cilacap. Lalu dua unit lagi, ukuran yang sama, di pantai utara Banten. Itu hasil kerja sama dengan swasta nasional.

Sebenarnya, izin pertama pembangunan unit 1.000 MW seperti itu diberikan kepada grup Adaro. Di Batang, Jateng, yang kalau Andalewattol, antara Tegal-Semarang, terlihat megah di kiri tol.

A d a r o b e k e r j a s a m a dengan Jepang. Menggunakan teknologi Jepang dan kontraktor Jepang. Tapi sampai sekarang PLTU itu masih belum selesai. Disalip oleh Cilacap dan Banten itu dua-duanya teknologi RRT dengan kontraktor RRT.

Partner PJB di proyek Danau Cirata kali ini pun serius. Dari grup yang sangat terkenal di dunia:

Mubadalah Group. Induk dari Masdar Corporation.

Masdar adalah pemilik pembangkit listrik tenaga surya pertama di gunung pasir. Hanya sistemnya baru: pakai CSP -concentrated solar power. Bukan solar panel. Yakni: sinar matahari dipantulkan lewat ribuan cermin besar ke satu titik di atas tower setinggi sekitar 100 meter. Di "titik panas" itu dipasang tangki air. Mendidih. Menghasilkan uap. Uap itu diubah menjadi bertekanan tinggi. Agar mampu memutar turbin. Putaran turbin itu dihubungkan dengan generator. Putaran generator menghasilkan listrik.

Teknologi CSP itu masih mahal sekali. Listrik yang dihasilkannya bisa 7 kali lebih mahal dari batu bara. Atau 3 kali lebih mahal dari solar cell yang dilengkapi baterai.

Tentu solar cell yang di Waduk Cirata nanti bisa murah. Tidak harus dilengkapi baterai. Harganya hanya 5,8 cent

dolar. Disalurkan ke PLN siang hari: ketika ada sinar matahari.

Sebenarnya PLN, untuk siang hari, sekarang ini, sudah kelebihan listrik. Banyak sekali. Itu gara-gara pandemi - dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum itu.

Andai PLTS raksasa ini

tidak di Waduk Cirata mungkin PLN akan menolak membelinya. Pertama, listrik sudah berlebih. Kedua, pasokan listrik dari PLTS seperti itu tidak stabil - tergantung cuaca. Ketidakstabilan itu bisa mengganggu sistem besar PLN yang sangat peka.

Tapi karena letaknya di Waduk Cirata tidak akan mengganggu sistem PLN.

Di waduk itu PJB sudah memiliki pembangkit listrik tenaga air (air terjun). Juga besar sekali: 1.000 MW.

Yang dipasokan ke PLN

khusus untuk sore/malam hari. Yakni saat pemakaian plastik itu. Sekarang ini sudah banyak dermaga kapal yang diapungkan di atas GRP.

Lisrik dari PLTS 100

MW tadi akan lebih dulu

disinkronkan dengan lisrik PLTA itu. Baru kemudian dikirim ke PLN.

Sejak itu PLTS 100

MW segera akan lewat

panel surya.

Bagaimana cara

mengapungkan panel surya

itu di atas danau?

Biasa saja. Panel itu

dipasang di atas rangkaian.

Rangkaian itu dipasang

di atas pengapung.

Pengapungnya terbuat dari

GRP - yang mirip jeriken plastik itu. Sekarang ini

sudah banyak dermaga

kapal yang diapungkan di atas GRP.

Lisrik dari PLTS 100

MW tadi akan lebih dulu

disinkronkan dengan lisrik

PLTA itu. Baru kemudian

dikirim ke PLN.

Selama ini, PJB juga sudah

punya PLTS di Cirata. Di

atas tanah. Kapasitasnya 1

MW. Sejak itu sinkronisasi

sistemnya sudah mapan.

Bagaimana cara

mengapungkan panel surya

itu di atas danau?

Kalau proyek ini sukses

-selesai tahun 2022- tentu

menjadi inspirasi proyek

berikutnya. Terutama

bagi daerah yang punya

banyak danau. Apalagi

Masdar berkomitmen

untuk membawa industri

solar cell ke Indonesia -dari

Tiongkok.

Kapasitas 100 MW

tentu memerlukan solar

panel yang sangat banyak.

Memadai sudah untuk

diproduksi di dalam negeri.

Memang selalu akan ada

cerita dari Waduk Cirata.

(*)

Kapolri Minta Polisi Tak Kekang Pers

dari halaman 1

Islam (FPI).

Komunitas terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewartawan Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pmedred) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Dalam keterangan tertulisnya, Komunitas Pers menyatakan Pasal 2d dalam maklumat itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat

negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

"Tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalisme dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarkannya kepada publik," demikian

dalam keterangan tertulisnya

Komunitas Pers.

Pasal 2d Maklumat

dikonfirmasi Gorontalo Post

membenarkan bahwa

materai Rp 10.000,-

masih diberikan waktu

selama satu tahun

untuk menggunakan

surat kabar

seperti koran

dan majalah

seperti majalah

seperti majalah

seperti majalah